

**PENGARUH *GOOD GOVERNANCE*, PENGENDALIAN INTERN DAN
GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(Studi pada SKPD Kabupaten Siak)**

Oleh:

Istiqomatunnisa

Pembimbing : Amries Rusli Tanjung dan Rusli

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : istiqomatunnisa19@gmail.com

*The Effect of Good Governance, Internal Control And
Leadership Style Of Local Government
(Study On Local Work Unit Siak)*

ABSTRACT

This research aims to test the influence of good governance, internal control and leadership style on performance of local government city of Siak. This research was carried out on the units of works devices of Siak. The population in this research is the employees who work in a work unit of the devices area. The technique used is the sample of purposive sampling. The respondents in this study is echelon officer III and IV. The sample used in this study as much as 75 respondents. Statistical methods are used to test the hypothesis of the research is the analysis of multiple linear regression using the software spss version 21.0. The result of this study indicate that the variable are good governance variables affect the performance of local government with a regression coefficient of 0,239 and 0,024 significant value ($\alpha < 0,05$) of $t_{count} > t_{table}$ that is $2,300 > 1,994$. Internal control variables affect the performance of the local government with a regression coefficient of 0,173 and 0,007 significant value ($\alpha < 0,05$) this shown by the result of $t_{count} > t_{table}$ that is $2,788 > 1,994$. And leadership style affect the performance of the local government, with a regression coefficient of 0,480 and 0,012 significant value ($\alpha < 0,05$) this shown by the result of $t_{count} > t_{table}$ that is $2,578 > 1,994$. Based on the calculation of the coefficient of determination (R^2) obtained a value of 0,364. This shows that the influence of the independent variables in the dependent 36,4% and the remaining 63,4% influenced by other variables.

Keywords: Good governance, internal control, leadership style, local government permormance

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan

urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggungjawab yang direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, menjadi momentum bagi reformasi akuntansi keuangan daerah dan

manajemen keuangan daerah di Indonesia pun berlaku dengan keluarnya UU No. 25 tahun 1999 yang direvisi UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Lalu adanya perubahan UU No. 12 tahun 2008 tentang pemerintah daerah. Selanjutnya dikeluarkan UU No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah. UU tersebut telah merubah akuntabilitas pemerintah daerah dari pertanggungjawaban vertikal (kepada pemerintah pusat) ke pertanggungjawaban horizontal (kepada masyarakat, melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)).

Sebagai organisasi sektor publik, pemerintah daerah dituntut agar memiliki kinerja yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dan mendorong pemerintah agar senantiasa tanggap akan tuntutan lingkungannya, dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berkualitas serta adanya pembagian tugas yang baik pada pemerintahan tersebut. Dengan adanya tuntutan dari masyarakat yang semakin tinggi terhadap pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah diharapkan adanya perubahan kinerja baik secara individu maupun kelompok menyangkut prestasi kerja yang diberikan kepada instansi.

Menurut Bastian (2006) kinerja adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Daftar apa yang ingin dicapai tertuang dalam perumusan strategi (*strategy planning*) suatu organisasi. Secara umum, kinerja merupakan prestasi yang dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu. Pemerintah daerah

merupakan salah satu bagian dari organisasi sektor publik. Dalam praktiknya definisi organisasi sektor publik di Indonesia adalah organisasi yang menggunakan dana masyarakat, dalam hal ini organisasi pemerintah daerah salah satunya. Kinerja instansi pemerintah daerah didefinisikan sebagai keseluruhan pencapaian hasil yang telah diraih dan telah dicapai oleh pemerintah daerah dalam menangani keseluruhan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam satu periode tertentu (Fadel, 2008). Pengukuran kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, pengelolaan organisasi dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun tujuan utama pengukuran kinerja instansi pemerintah daerah untuk memperbaikinya pengambilan keputusan internal dan alokasi sumber daya.

Kinerja instansi pemerintahan sering dinilai buruk oleh beberapa pihak, hal ini disebabkan oleh kegagalan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis (Pratiwi 2011). Dimensi lain penyebab buruknya kinerja pemerintah yaitu adanya penyelewengan oleh oknum pemerintah daerah yang dapat diamati dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Pengguna dan pengelola APBD di pemerintahan daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dalam pengelolaan dan penggunaan APBD oleh SKPD, masalah yang selalu menjadi sorotan masyarakat adalah inefisiensi, kebocoran, dan pemborosan anggaran. Sehingga muncul tuntutan agar SKPD

meningkatkan pelayanan melalui perwujudan *value for money* dalam menjalankan atau melaksanakan kegiatannya. *Value for money* merupakan konsep pengelolaan pelayanan umum yang didasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja dan kinerja instansi dan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan.

Dalam konteks organisasi publik, pengukuran kinerja instansi pemerintah merupakan suatu hal yang penting, karena dengan adanya kinerja maka akan diketahui tingkat pencapaian hasil yang telah dicapai, atau akan diketahui seberapa jauh pelaksanaan tugas-tugas yang dapat dilaksanakan.

Konsep *governance* bukanlah konsep baru, konsep *governance* sama luasnya dengan peradaban manusia, salah satu pembahasan tentang *good governance* dapat ditelusuri dari tulisan J.S Endarlin (Setyawan, 2004:223) *governance* merupakan suatu terminologi yang menggantikan istilah *government* yang menunjuk pada penggunaan otoritas politik, ekonomi administrasi dalam mengelola masalah-masalah kenegaraan. Menurut LAN dan BPKP (2000:6) mendefinisikan *good governance* sebagai penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat (*society*). Dengan demikian pemerintah sebagai pelaku utama pelaksanaan *good governance* ini dituntut untuk

memberikan pertanggungjawaban yang lebih transparan dan lebih akurat. Hal ini semakin penting untuk dilakukan dalam era reformasi ini melalui pemberdayaan peran lembaga-lembaga kontrol sebagai pengimbang kekuasaan pemerintah.

Penelitian mengenai pengaruh *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah telah dilakukan oleh Ulfa Fimela (2011), Prima Yuda (2012) dan Rindu Suciyanti (2013) yang menyatakan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Selain itu pengendalian intern juga mempengaruhi kinerja instansi pemerintah. Dalam PP No. 6 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, pengendalian intern didefinisikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pengendalian intern yang dikeluarkan COSO terdiri dari lima komponen yaitu lingkungan pengendalian, penilaian resiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Menurut (Soeseno, dalam Ramandei 2009) menyatakan dengan adanya pengendalian intern maka seluruh proses kegiatan audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisiensi untuk

kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Oleh karena itu diharapkan dengan sistem pengendalian intern yang efektif akan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintahan.

Penelitian yang dilakukan Yuda (2012), Tresnawati (2012) menyebutkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Amelia, (2014).

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah adalah gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin yang ideal harus memiliki gaya kepemimpinan yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja organisasinya. Flipppo (1994) dalam Nurjannah (2008:39) berpendapat gaya kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu pola perilaku yang dirancang untuk memadukan kepentingan-kepentingan organisasi dan personalia guna mengejar beberapa sasaran. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin sangat diperlukan dalam suatu organisasi karena maju mundurnya suatu organisasi tergantung seberapa baik pemimpin dapat memainkan perannya agar organisasi tersebut hidup dan berkembang.

Penelitian yang dilakukan oleh Rokhmaloka Habsoro Abdillah (2011) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja instansi pemerintah. Berbeda dengan Sri Maryati, Fachruzzaman, dan Nila Aprila (2013) menyatakan gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Penelitian ini mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Prima Yuda (2012) tentang pengaruh *good governance* dan pengendalian intern terhadap kinerja organisasi (survey pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya). Penelitian yang sama akan digunakan dengan menambahkan variabel baru yaitu gaya kepemimpinan. Perbedaan antara penelitian penulis dengan penelitian Prima Yuda (2012) terletak pada variabel yang diteliti. Peneliti menambahkan variabel gaya kepemimpinan untuk mengetahui sejauhmana pengaruhnya terhadap kinerja instansi pemerintah. Perbedaan lainnya terletak pada objek yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan objek yang berbeda yakni pada SKPD kabupaten Siak sedangkan penelitian sebelumnya pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Apakah *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah? 2) Apakah pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah? 3) Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk 1) Menguji dan menganalisis pengaruh *good governance* terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD kabupaten Siak. 2) Menguji dan menganalisis pengaruh pengendalian intern terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD kabupaten Siak. 3) Menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD kabupaten Siak.

TINJAUAN PUSTAKA

Kinerja Instansi Pemerintah

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan dampak negatif suatu kejadian operasional yang diambil. Dengan adanya informasi mengenai kinerja suatu instansi pemerintah, akan dapat diambil tindakan yang diperlukan seperti koreksi atas kebijakan, meluruskan kegiatan-kegiatan utama dan tugas pokok instansi, bahan untuk perencanaan, menentukan tingkat keberhasilan instansi untuk menentukan suatu tindakan lain-lain.

Menurut Moeheriono (2009:60) pengertian kinerja (*performance*) merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Adapun indikator kinerja instansi pemerintah daerah yang diperoleh dari Putra D (2013) adalah : perencanaan, investigasi, pengkoordinasian, evaluasi, pengawasan, pengaturan staff, negoisasi, perwakilan dan kinerja secara menyeluruh.

Good Governance

Secara konseptual, pengertian kata baik (*good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman: Pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan

nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009:275).

Pengertian *governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. World Bank dalam Mardiasmo (2002:17) mendefenisikan *governance* sebagai “*the way state power is used in managing economic and resources for development society*”. Sedangkan United Nation Development Program (UNDP) mendefenisikan *governance* sebagai “*the exercise of political economic, and administrative authority to manage a nation's affair at all levels*”. Dalam hal ini World Bank lebih menekankan pada cara pemerintah mengelola sumber daya sosial dan ekonomi untuk kepentingan pembangunan masyarakat, sedangkan UNDP lebih menekankan pada aspek politik, ekonomi, dan administratif dalam pengelolaan negara di semua tingkatan. Adapun indikator *good governance* menurut UNDP ada 9 yaitu : Partisipasi, *rule of law* (taat hukum), keterbukaan, *responsive*, berorientasi kebijakan konsensus, kesetaraan membela yang lemah, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi strategis.

Pengendalian Intern

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008, sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan

seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tujuan adanya pengendalian intern adalah untuk menjaga kekayaan organisasi/ mengamankan aset, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut PP No. 60 Tahun 2008 terdapat beberapa indikator yaitu 1) lingkungan pengendalian 2) penilaian resiko 3) kegiatan pengendalian 4) informasi dan komunikasi 5) pemantauan.

Gaya Kepemimpinan

Gaya pada dasarnya berasal dari bahasa Inggris "*Style*" yang berarti mode seseorang yang selalu nampak yang menjadi ciri khas orang tersebut. Tiap pemimpin mempunyai gaya atau cara tersendiri dalam memimpin organisasi atau perusahaan.

Menurut Stoner (1996), gaya kepemimpinan adalah berbagai pola tingkah laku yang disukai oleh pemimpin dalam proses mengarahkan dan mempengaruhi pekerja. Stoner juga membagi dua gaya kepemimpinan yaitu 1) gaya yang berorientasi pada tugas mengawasi pegawai secara ketat untuk memastikan tugas dilaksanakan dengan memuaskan. 2) gaya yang berorientasi pada pegawai lebih menekankan pada memotivasi ketimbang mengendalikan bawahan. Gaya ini menjalin hubungan bersahabat, saling percaya, dan saling menghargai dengan pegawai yang sering kali diizinkan untuk

berpartisipasi dalam membuat keputusan yang mempengaruhi mereka. Adapun indikator yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan menurut Rivai (2004) yaitu bertanggung jawab terhadap pekerjaan, mengamati lingkungan kerja, mengamati kondisi kerja pegawai, menilai prestasi kerja secara obyektif, mampu menentukan prioritas kerja, dan mampu menentukan prioritas keputusan.

Kerangka Pemikiran

Pengaruh *Good Governance* terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2002) *Governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. *Good Governance* diartikan sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika dalam berusaha/berkarya merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun publik. *Good governance* tidak hanya terbatas pada pelayanan diberikan, dijalankan dan dikelola, tetapi juga pada bagaimana keputusan tentang pelayanan-pelayanan itu diambil dan bertujuan meningkatkan kinerja pemberian pelayanan.

Good governance merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola kegiatan pemerintah ke arah peningkatan kinerja. Dengan terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat utama dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita

bangsa dan negara. Dengan adanya *good governance* yang baik tentu kinerja suatu pemerintahan akan baik pula sesuai dengan tujuan pemerintahan (Herwidayatno, 2000)

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H1: Diduga *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Pengendalian intern terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organization of The Treadway Comission* (COSO) adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya dari sebuah entitas, yang dirancang untuk memberikan keyakinan/jaminan yang wajar dengan pencapaian tujuan dalam kategori yaitu efektifitas dan efisiensi operasi, keandalan laporan keuangan, kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 pengendalian intern merupakan suatu perencanaan, metode, prosedur yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam pencapaian efektifitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya pengendalian intern, maka akan tercipta pemerintahan yang ekonomis, efektif, dan efisien dalam instansi yang akhirnya akan mengacu ke kinerja pemerintahan.

Menurut Mardiasmo (2002:143) untuk mewujudkan

kinerja pemerintah daerah yang sesuai dengan *value for money* (*economy, efficiency, effective*), perlu peningkatan fungsi aparat pemeriksaan fungsional pemerintah dilingkungan pemerintah daerah. Boynton (2006) dalam Siti Hamidah (2015) menyatakan fungsi aparat pemeriksaan fungsional melaksanakan fungsi pengendalian intern yang merupakan suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Diduga pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

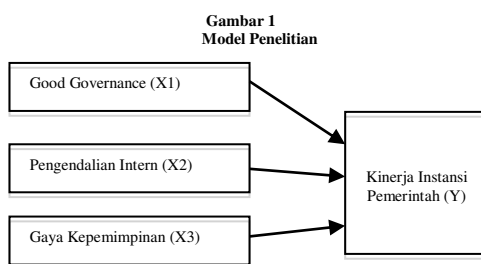
Kepemimpinan pemimpin yang diperlihatkan dan diterapkan kedalam suatu gaya kepemimpinan merupakan salah satu faktor dalam peningkatan kinerja, karena pada dasarnya sebagai tulang punggung pengembangan organisasi dalam mendorong, dan mempengaruhi semangat kerja yang baik kepada bawahan. Untuk itu pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinannya yang tepat dalam penerapannya (Johannes Tampi: 2014).

Gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku yang dirancang sedemikian rupa untuk mempengaruhi bawahannya agar dapat memaksimalkan kinerja yang dimiliki bawahannya sehingga kinerja organisasi dan tujuan organisasi dapat dimaksimalkan. Seorang pemimpin harus

menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya (Waridin dan Bambang Guritno:2005).

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan hipotesis sebagai berikut:

H3 : Diduga gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah



Sumber: Data Olahan, 2016

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di lingkungan pemerintah kabupaten Siak, provinsi Riau. Kuesioner penelitian ini disebar ke Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lebih spesifiknya ke Dinas, Badan dan Kantor di lingkungan pemerintah kabupaten Siak. Kuesioner ini dikembalikan maksimal satu bulan setelah dibagikan.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Siak. Dalam penelitian ini, peneliti hanya mengambil sampel pada Dinas, Badan, dan Kantor yang terdapat di lingkungan SKPD Kabupaten Siak. Hal ini disebabkan untuk mempersempit ruang lingkup penelitian dikarenakan keterbatasan waktu. Responden dalam penelitian adalah pejabat eselon III dan IV yang terdapat pada Dinas, Badan dan

Kantor di lingkungan SKPD Kabupaten Siak.

Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier bergandayang dirumuskan sebagai berikut :

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

a = Konstanta

$\beta_{1,2,3}$ = Koefisien Regresi Parsial

e = Variabel Pengganggu (error)

X_1 = *Good Governance*

X_2 = Pengendalian Intern

X_3 = Gaya Kepemimpinan

Y = Kinerja Instansi Pemerintah

Definisi Operasional Variabel

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan memudahkan pelaksanaan penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan definisi operasional variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, variabel independennya terdiri dari *good governance* (X1), pengendalian intern (X2), dan gaya kepemimpinan (X3). Sedangkan variabel dependennya adalah kinerja instansi pemerintah (Y).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif Variabel

Statistik deskriptif variabel dalam penelitian ini dapat digambarkan seperti sebagai berikut:

Tabel 1
Statistik Deskriptif Variabel

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
GG	75	44,00	65,00	55,5333	5,19702
PI	75	68,00	110,00	93,3333	8,93722
GK	75	18,00	30,00	26,5467	2,90523

KIP	75	25,00	50,00	39,5333	5,18139
Valid N	75				

Sumber: Data Olahan, 2016.

Hasil Pengujian Validitas Data

Uji validitas data digunakan untuk menguji masing-masing variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada penelitian ini terdapat 51 item pernyataan yang harus dijawab oleh responden. Adapun kriteria yang digunakan dalam menentukan valid atau tidaknya pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat kepercayaan 95% ($\alpha = 5\%$), *degree of freedom* (df) = $n - 2 = 75 - 2 = 73$, sehingga didapat r tabel sebesar 0,227. Dari 51 item pernyataan yang diajukan dalam variabel independen semuanya memiliki r_{hitung} dan r_{tabel} . Dengan demikian semua butir pertanyaan variabel *good governance*, pengendalian intern dan gaya kepemimpinan adalah valid.

Hasil Pengujian Realibilitas

Untuk melihat realibilitas data dari instrumen-instrumen yang digunakan dalam penelitian ini, akan dihitung dengan menggunakan rumus *Crobach's Alpha*. Hasil pengujian realibilitas data dapat dilihat pada tabel 2:

Tabel 2
Hasil Pengujian Realibilitas

Variabel	Crobach's Alpha	Nilai Kritis	Keterangan
KIP	0,854	0,6	Reliabel
GG	0,880	0,6	Reliabel
PI	0,949	0,6	Reliabel
GK	0,907	0,6	Reliabel

Sumber: Data Olahan, 2016.

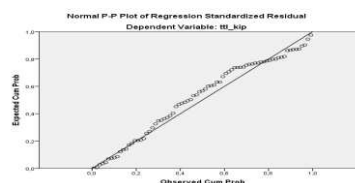
Dilihat dari tabel 2 di atas menunjukkan bahwa besarnya *Crobach's Alpha* pada seluruh variabel baik variabel kinerja instansi pemerintah, *good governance*, pengendalian intern dan

gaya kepemimpinan lebih besar 0,6 sehingga dikatakan reliabel.

Hasil Pengujian Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah variabel terkait dan variabel bebas dalam model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian normalitas data dengan P-Plot untuk variabel dependen (Y) kinerja instansi pemerintah dapat dilihat pada gambar 2 :

Gambar 2
Hasil Pengujian Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2016.

Dengan melihat tampilan grafik normal P-Plot diatas dapat disimpulkan bahwa grafik normal P-Plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal, serta arah penyebarannya mengikut arah garis diagonal. Dapat diartikan bahwa model regresi memenuhi asumsi normalitas. Grafik tersebut menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai karena memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Pengujian Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik adalah asumsi-asumsi yang harus dipenuhi dalam menyusun regresi berganda, sehingga hasilnya tidak bias. Untuk mengetahui apakah hasil estimasi regresi yang dilakukan terbebas dari gejala normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas dan autokorelasi perlu dilakukan pengujian yang disebut dengan uji asumsi klasik. Hal tersebut agar hasil

regresi dapat menarik suatu kesimpulan (Ghozali, 2005).

Hasil Pengujian Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Tabel 3
Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel	Collinearity Statistics		Keterangan
	Tolerance	VIF	
GG	.792	1.263	Bebas Multikolinearitas
PI	.752	1.330	Bebas Multikolinearitas
GK	.788	1.270	Bebas Multikolinearitas

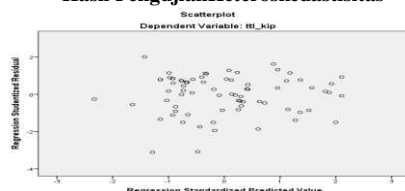
Sumber: Data Olahan, 2016.

Dari hasil perhitungan hasil analisis data diatas, diperoleh nilai VIF untuk seluruh variabel bebas < 10 dan *tolerance* > 0,10. Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *Scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual ($Y_{\text{prediksi}} - Y_{\text{sesungguhnya}}$) yang telah *di-studentized*.

Gambar 3
Hasil Pengujian Heteroskedastisitas



Sumber: Data Olahan, 2016.

Dari grafik *scatterplot* di atas terlihat bahwa titik-titik menyebar

secara acak serta penyebarannya terletak di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Autokorelasi

Berdasarkan hasil uji autokorelasi dengan menggunakan program SPSS diperoleh nilai Durbin Watson sebesar = 1,781 yang menunjukkan bahwa tidak ditemukannya autokorelasi dalam model regresi moderasi.

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel bebas (*Good Governance*, Pengendalian Intern dan Gaya Kepemimpinan) terhadap variabel terikat (Kinerja Instansi Pemerintah).

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-2.628	6.341		-.415	.680
GG	.239	.104	.240	2.300	.024
PI	.173	.062	.298	2.788	.007
GK	.480	.186	.269	2.578	.012

Variabel dependen : Kinerja Instansi Pemerintah

Sumber: Data Olahan, 2016.

Persamaan Regresi Berganda:

$$Y = -2,628 + 0,239X_1 + 0,173X_2 + 0,480X_3 + e$$

Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengaruh *Good Governance* Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} senilai (2,300) dan signifikan (0,024). Sedangkan t_{tabel} senilai 1,994. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,300 > 1,994$ dan signifikansi $0,024 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga pengujian hipotesis pertama (H_1) diterima.

Dari hasil pengujian hipotesis pertama dapat disimpulkan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi pelaksanaan *good governance*, maka kinerja instansi pemerintah juga akan semakin tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Rindu Suciyanti (2013) menemukan bahwa *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah

Pengaruh Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} senilai (2,788) dan signifikan (0,007). Sedangkan t_{tabel} senilai 1,994. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,788 > 1,994$ dan signifikansi $0,007 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_2 diterima, sehingga pengujian hipotesis kedua (H_2) diterima.

Dari hasil pengujian hipotesis kedua dapat disimpulkan bahwa pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Dengan adanya pengendalian intern dapat menjamin kinerja instansi pemerintah yang efektif. Sehingga dapat meminimalisir kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak di dalam sebuah instansi yang tidak bertanggung jawab dan dapat

melindungi aset instansi itu sendiri dari kecurangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tresnawati (2012) yang menunjukkan pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah

Dari hasil pengolahan data menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} senilai (2,578) dan signifikan (0,012). Sedangkan t_{tabel} senilai 1,994. Dengan demikian maka diketahui $t_{hitung} > t_{tabel} = 2,578 > 1,994$ dan signifikansi $0,012 < 0,05$. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_3 diterima, sehingga pengujian hipotesis ketiga (H_3) diterima.

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga dapat disimpulkan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah. Semakin tinggi gaya kepemimpinan, maka semakin tinggi pula kinerja instansi pemerintah. Hal ini disebabkan dengan adanya gaya kepemimpinan yang baik terhadap suatu pemerintahan akan dapat menciptakan kinerja yang maksimal untuk mencapai suatu tujuan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Habsoro Abdillah (2011) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah.

Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sri Maryati, Fachruzzaman, dan Nila Aprilia (2013) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kinerja SKPD.

Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan variansi dari variabel terikatnya.

Tabel 5
Hasil Pengujian
Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error Estimate
1	.624	.389	.364	4.13327

Sumber: Data Olahan, 2016.

Berdasarkan tabel 5 diatas, diperoleh nilai R sebesar 0,624 atau 62,4%. Sedangkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,364 atau 36,4%. Ini menunjukkan bahwa kinerja instansi pemerintah Kabupaten Siak dapat dijelaskan oleh faktor *good governance*, pengendalian intern, dan gaya kepemimpinan sebesar 36,4%. Sedangkan sisanya sebesar 63,6% dijelaskan oleh faktor-faktor yang tidak diamati dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil-hasil yang diperoleh dari analisis data, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Hasil pengujian hipotesis pertama memperoleh t_{hitung} sebesar 2,300 dan t_{tabel} sebesar 1,994 dengan nilai signifikan 0,024 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel *good governance* berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD

Kabupaten Siak. Artinya hipotesis pertama dalam penelitian ini diterima.

- 2) Hasil pengujian hipotesis kedua memperoleh t_{hitung} sebesar 2,788 dan t_{tabel} sebesar 1,994 dengan nilai signifikan 0,007 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel pengendalian intern berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Siak. Artinya hipotesis kedua dalam penelitian ini diterima.
- 3) Hasil pengujian hipotesis ketiga memperoleh t_{hitung} sebesar 2,578 dan t_{tabel} sebesar 1,994 dengan nilai signifikan 0,012 yang artinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Siak. Artinya hipotesis ketiga dalam penelitian ini diterima.
- 4) Berdasarkan perhitungan nilai koefisien determinasi, diperoleh *Adjusted R Square* sebesar 0,364 atau 36,4%. Hal ini menunjukkan variabel *good governance*, pengendalian intern, dan gaya kepemimpinan memberikan pengaruh sebesar 36,4% terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Siak. Sedangkan sisanya 63,6% dipengaruhi oleh variabel-variabel lain.

Saran

Berdasarkan temuan penelitian, pembahasan dan kesimpulan dari hasil

peneliti di atas dapat diberikan saran sebagai berikut :

- 1) Bagi Pemerintahan Kabupaten Siak dapat digunakan sebagai bahan masukan atau pertimbangan untuk dapat meningkatkan penerapan good governance, pengendalian intern dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Siak agar penyelenggaraan pemerintah daerah dapat berjalan dengan efektif dan efisien.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya agar dapat melakukan pengujian dengan menambahkan variabel lain seperti teknologi informasi, budaya organisasi, komitmen organisasi, sistem akuntansi keuangan daerah dan lain sebagainya.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya hendaknya membuat kuesioner yang baru dan disesuaikan dengan kondisi daerah yang diteliti sehingga dapat menggambarkan permasalahan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, Ira dan Nur Azlina. 2012. *Pengaruh Good Governance, Pengendalian Intern, Budaya Organisasi dan Motivasi Kerja pada Pemerintah SKPD Kabupaten Pelalawan*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Riau, Pekanbaru
- Bastian, Indra. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*, Jakarta: Erlangga
- Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission (COSO). 2008. *Pengendalian Internal & Manajemen Risiko*. Jakarta: Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
- Fadel, Muhammad. 2008. *Reinventing Local Government: Pengalaman dari Daerah*. Jakarta: Gramedia
- Fimela, Ulfa. 2011. *Pengaruh Good Governance, Gaya Kepemimpinan, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik*. Skripsi. Universitas Riau
- Ghozali, Imam. 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Habsoro Abdillah, Rokhmaloka, 2011. *Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai (Studi pada Pegawai Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi. Universitas Diponegoro. Semarang
- Guritno, Bambang dan Waridin, 2005. *Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku Kepemimpinan Kepuasan Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja*. JRBI. Volume 1. No1. Hal:63-74
- Herwidayatmo, 2000. *Implementasi*

*Good Corporate
Governance Untuk
Perusahaan Publik
Indonesia*

Tesis.Magister Manajemen
Program Pasca Sarjana
Universitas Diponegoro.
Semarang

- Johannes Tampi, Bryan. 2014. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Negara Indonesia, TBK (Regional Sales Manado)*. Jurnal Acta Diurna. Volume III. No. 4
- LAN dan BPKP, 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance (Modul Sosialisasi Sistem AKIP)*. Modul 1 dari 5. Jakarta: LAN
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit: Andi. Yogyakarta
- Maryati, Sri dan Fachruzzaman, Nila Aprila. 2013. *Pengaruh Kejelasan Tujuan, Gaya Kepemimpinan, dan Kinerja Keuangan Pemerintah terhadap Kinerja SKPD Provinsi Bengkulu*. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XVI Manado
- Moeheriono. 2009. *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Bogor : Ghalia Indonesia
- Nurjannah. 2008. *Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Budaya Organisasi Terhadap Komitmen Organisasi Dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan (Studi Pada Biro Lingkup Depatemen Pertanian)*.
- Pratiwi, Diana. 2011. *Hubungan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kota Bekasi*. Jurnal. Universitas Gunadarma. Depok. (papers.gunadarma.ac.id)
- Putra, Deki. 2013. *Pengaruh Akuntabilitas Publik dan Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Kinerja Manajerial Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang)*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Rivai, Veitzhal. 2004. *Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT.Raja Grafindo
- Ramandei, P. 2009. *Pengaruh Karakteristik Sasaran Anggaran Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Manajerial Aparat Pemerintah Daerah 16 (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Jayapura)*. Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi.Universitas Diponegoro Semarang
- Santosa & Ashari. 2005. *Analisis Statistic Dengan Microsoft Excel dan SPSS*. Andy: Yogyakarta

- Sedarmayanti, 2007. *Good Governance (Pemerintahan yang Baik) dan Good Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan yang Baik)*. Cetakan Kesatu. Mandar Maju : Bandung
- Setyawan, Dharma. 2004. *Manajemen Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Djambatan
- Siti Hamidah, Aida. 2015. *Pengaruh Pengendalian Intern dan Pelaksanaan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah (Survei pada Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Akuntansi Universitas Komputer Indonesia
- Stoner, James A.F; Freeman, R. Edward; Gilbert JR, Daniel. R. 1996. *Manajemen*. Jilid I. PT.Bhuana Ilmu Populer
- Suciyanti, Rindu. 2013. *Pengaruh Good Governance , Pengendalian Intern dan Budaya Organisasi Pada Pemerintah SKPD Kabupaten Bengkalis*. Skripsi. Universitas Islam Riau. Pekanbaru
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Bisnis*. Cetakan IV. Alfabeta: Bandung
- Tresnawati, Rina. 2012. *Pengaruh Efektifitas Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah di Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung*. Jurnal Universitas Widyatama. Bandung
- Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah
- Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah
- UNDP. 2008. *Kajian Pengeluaran Publik Indonesia 2007*. Kemitraan. Jakarta
- Yuda, Prima. 2012. *Pengaruh Good Governance dan Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Organisasi (Survey pada Dinas Daerah Kota Tasikmalaya)*. Jurnal. Volume 1. No.4